

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Unit Analisis

4.1.1 Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'rif Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000

ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Pada Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point* outlet yang didalamnya terdiri dari 81 outlet layanan mikro serta 1500 jaringan SCO BNI (*Shariah Channeling Outlet*) di seluruh Indonesia yang dapat melayani pembukaan rekening syariah. Selain itu pula BNI Syariah juga memperoleh dukungan teknologi IT dari jaringan distribusi infrastruktur BNI Induk, 7164 jaringan ATM BNI, 23.000 ATM Link dan 34.000 ATM bersama serta fasilitas phonebanking 24 jam BNI call di 500046 serta SMS Banking dan Internet Banking. BNI Syariah telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun visi BNI syariah ini adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”. Dan misinya yaitu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah, memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor, menciptakan

wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah, dan menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Sejak didirikan pada tanggal 19 Juni 2010 sebagai Bank Umum Syariah (BUS), BNI Syariah telah beroperasi selama tiga tahun dalam mengabdikan kepada negeri. Selama tiga tahun bank milik anak perusahaan BUMN BNI tersebut, telah memantapkan diri sebagai salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia. Meski tergolong muda perkembangan BNI Syariah cukup menjadikan perhitungan bagi perbankan nasional di tanah air. Dalam perkembangan per 31 Mei 2013 BNI Syariah mampu menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 9,105 triliun diberbagai sektor usaha dan sekaligus mampu menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 10,875 triliun. Selain itu pula BNI Syariah memiliki keterpihakan sangat besar dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dimana hingga saat ini sudah Rp 466, 190 milyar pembiayaan yang disalurkan. Keterpihakan ini dikatakan oleh Direktur Utama BNI Syariah, Dinno Indiano dalam acara puncak milad 3 BNI Syariah di Musium Satria Mandala Angkatan Darat Jakarta Selatan yang diadakan pada 23/06/2013 akan terus dipertahan bahkan dalam pembiayaan perumahan juga BNI Syariah fokus pada konsumen masyarakat kelas menengah dan bawah.

Dalam milad-nya yang ke-3 beragam kegiatan dilakukan oleh BNI Syariah, diantaranya adalah donor darah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni, Porseni (pekan olah raga dan seni) pada tanggal 15 Juni. Dalam milad kali ini tema yang diangkat oleh BNI Syariah berbeda dengan tahun tahun sebelumnya

yang cenderung pada tema keluarga. Menurut Dinno, sengaja konsep bertema keluarga itu dibuat karena produk-produk yang dimiliki oleh BNI Syariah adalah berorientasi keluarga.

4.1.2 Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan

dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

4.1.3 Bank Mandiri Syariah

Bank Syariah Mandiri adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini telah beberapa kali berganti nama. Bank ini berdiri pada 1955 dengan nama Bank Industri Nasional, namun pada tahun 1967 berganti nama menjadi PT Bank Maritim Indonesia, berganti nama lagi pada tahun 1973 menjadi PT Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi, dan terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 dan menjadi pemegang saham mayoritas Bank Susila Bakti. Tahun 2002 Bank Syariah Mandiri mendapat status Bank Devisa.

Bank Syariah Mandiri (BSM) ini hadir sejak tahun 1999 setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1997 – 1998. Dan, sejak berdiri, bank ini sudah menggunakan konsep menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas.

Pada saat itu, krisis sudah mulai masuk di semua aspek. Mulai dari dunia politik nasional, dunia perbankan, dunia usaha dan banyak lainnya, yang secara langsung menimbulkan berbagai dampak negatif pada kehidupan rakyat Indonesia. Khusus dunia perbankan, banyak bank konvensional yang mendapatkan dampak buruk dari krisis ini. Akhirnya, Pemerintah berusaha mengatasinya dengan cara merestrukturisasi dan merekapitalisasi bank-bank ini. Salah satu bank konvensional yang terkena dampak krisis ini adalah PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk mengatasi masalah ini, BSB berusaha untuk mengupayakan *merger* untuk mendapatkan investor asing.

Pemerintah juga mengupayakan beberapa penggabungan (*merger*) untuk beberapa bank. Salah satunya adalah *merger* empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapino menjadi PT Bank Mandiri. Tanggal 31 Juli 1999, yaitu tanggal penggabungan ini dan menjadi tanggal lahir Bank Mandiri yang sebagian besar saham dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik baru BSB. Keluarnya UU No. 10 tahun 1998 menjadi titik dimana Bank Mandiri mulai membentuk layanan perbankan syariah. Setelah proses *merger*, Bank Mandiri membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah untuk membuat layanan transaksi syariah (*dual banking system*). UU ini juga menjadi landasan Tim Pengembang Perbankan Syariah untuk mengubah PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah. Tim ini mempersiapkan segalanya, mulai dari system dan infrastruktur. Dan seperti yang tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999, bank ini berubah nama dan menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Setelah itu, keluar Gubernur Bank Indonesia meresmikan perubahan kegiatan usaha BSB dengan dikeluarkannya SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Dengan ini, sistem operasi BSB berubah menjadi sistem perbankan berbasis syariah. Dan, untuk perubahan nama dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri juga disetujui melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999. Akhirnya, Bank Syariah Mandiri resmi beroperasi. Tanggal yang menjadi awal mula Bank Syariah Mandiri lahir dan berkuat di dunai perbankan Indonesia adalah hari Senin, 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri tumbuh menjadi bank yang memadukan 2 konsep perbankan, yaitu idealisme usaha dan nilai rohani. Dan, perpaduan inilah yang menjadi salah satu nilai lebih dari Bank Syariah Mandiri. Dan yang terakhir, Bank Syariah Mandiri hadir untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik.

4.1.4 BANK PANIN SYARIAH

Panin Bank Syariah adalah lembaga perbankan yang berbasis di Jakarta. Bank ini beberapa kali melakukan perubahan nama, yang pertama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja pada 08 Januari 1972, berganti lagi menjadi PT Bank Bersaudara Jaya pada 08 Januari 1990, dan berganti nama yang ketiga kalinya menjadi Bank Harfa yang berpusat di Surabaya yang berdiri pada 27 Maret 1997. Dan pada akhirnya menetapkan dengan nama PT Bank Panin Syariah, per 03 Agustus 2009.

Panin Bank merupakan salah satu bank komersial utama di Indonesia. Didirikan pada tahun 1971 hasil merger dari Bank Kemakmuran, Bank Industri Jaya, dan Bank Industri Dagang Indonesia. Panin Bank mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta tahun 1982 yang menjadikannya sebagai bank pertama yang diperdagangkan secara terbuka di bursa. Per Juni 2009, Panin Bank tercatat sebagai bank ke-7 terbesar di Indonesia dari segi total aset Rp.71,2 triliun, dengan permodalan mencapai Rp. 9,8 triliun dan CAR 23,9%. Dengan struktur permodalan yang kuat dan Rasio Kecukupan Modal yang tinggi, Panin Bank

bersyukur tidak harus direkapitalisasi oleh Pemerintah pasca krisis ekonomi (1998).

PT Bank Panin Syariah Tbk berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Panin Bank memiliki jaringan usaha lebih dari 450 di berbagai kota besar di Indonesia dan lebih dari 18.500 ATM ALTO dan jaringan ATM Bersama, *Internet Banking*, *Mobile Banking*, *Phone Banking*, dan *Call Centre* serta kartu debit bekerja sama dengan *MasterCard*, *Cirrus*, *Maestro* yang diakses secara internasional. Strategi usaha Panin Bank fokus pada bisnis perbankan retail. Panin Bank berhasil memposisikan sebagai salah satu bank utama yang unggul dalam produk jasa konsumen dan komersial.

Pemegang saham Panin Bank adalah *Australia and New Zealand Banking (ANZ) Group Ltd* (37,1%) melalui sahamnya di *Votraint No. 1103 Pty Ltd*, PT Panin Financial Tbk (45,9%), dan publik baik domestik maupun internasional. Saat ini, Bank Panin memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara lain: *Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN)* (51,49%), Bank Panin Syariah Tbk (PNBS) (52,11%) dan PT Verena Multi Finance Tbk (VRNA) (42,87%). PNBS memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 02 Desember 2009.

Visi Panin Bank adalah menjadi "Bank Nasional" dalam Arsitektur Perbankan Indonesia di masa datang. Melalui layanan produk yang inovatif, jaringan distribusi nasional dan pengetahuan pasar yang mendalam, Panin Bank siap untuk terus memperluas pangsa pasar dan berperan serta dalam meningkatkan fungsi intermediasi keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

4.1.5 BCA (BANK CENTRAL ASIA) SYARIAH

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. Kepemilikan saham PT Bank BCA Syariah adalah PT Bank Central Asia Tbk. 596.299 lembar saham dan PT BCA Finance 1 lembar saham.

BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah perseorangan, mikro, kecil dan menengah. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga

tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (Electronic Data Capture) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. Sementara, untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan keluhan, para nasabah pun dapat menghubungi HALO BCA di 500 888.

BCA Syariah hingga saat ini memiliki 45 jaringan cabang yang terdiri dari 8 Kantor Cabang (KC), 3 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Cabang Pembantu Mikro Bina Usaha Rakyat (BUR), 8 Kantor Fungsional (KF) dan 23 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung dan Solo (data per Desember 2014).

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah

dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,00003% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

Perjalanan tahun 2013-2014 merupakan tahun yang cukup berat bagi industri perbankan, di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan global yang sarat ketidakpastian dan menyimpan banyak risiko serta upaya konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan moneter bias ketat guna menjaga kepercayaan pasar, serta mengendalikan defisit transaksi berjalan.

Di penghujung 2014 sebagai tahun puncak transisi politik ini, sejumlah indikasi awal perbaikan ekonomi mulai tampak. Di tengah kondisi moneter yang ketat, perbankan telah menunjukkan kinerjanya sejak tahun 2013 dengan terbuktinya stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga, *Non-performing Loan* (NPL) perbankan berada pada tingkat yang rendah sebesar 2.3 % dari total kredit per September 2014. Permodalan berada pada posisi yang memadai dengan CAR sebesar 19,4 %, dengan pertumbuhan kredit mencapai 13,2% (*yoy*) termasuk di lembaran baru tahun 2015 masih banyak beban persoalan struktur moneter yang perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya. Di tengah kondisi tersebut, apresiasi dari *Economic Review* bekerjasama dengan Perbanas *Institute* melalui Anugerah Perbankan Indonesia patut diberikan kepada perbankan. Penghargaan ini

merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi perbankan yang signifikan bagi pengembangan perekonomian nasional di tahun 2013 yang terukur dari kinerja financial dan seluruh aspek lain termasuk *Good Corporate Governance (GCG)*, *Human Capital*, *Information Technology*, *Marketing*, *Risk Management*, *Corporate Communication* hingga *Corporate Social Responsibility*. Bertempat di *Financial Hall*, Graha Niaga, Anugerah Perbankan Indonesia 2014 terselenggara acara ajang apresiasi dan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada Perbankan di Indonesia atas kinerja keuangan tahun 2013 dan tingkat kontribusi perbankan yang signifikan bagi perekonomian nasional melalui peningkatan kinerja, profesionalisme dan daya saing perusahaan.

Pada kesempatan tersebut, BCA Syariah berhasil mengukuhkan kembali untuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan dengan meraih peringkat terbaik kedua sebagai *The Best Bank 2014* untuk kategori Bank Syariah BUKU 1 (Bank Umum Kelompok Usaha dengan modal inti < 1 Triliun). Hadir dalam acara tersebut, John Kosasih – Wakil Presiden Direktur BCA Syariah untuk menerima penghargaan. Hal ini merupakan hasil yang dipetik BCA Syariah setelah mampu menghadirkan ragam produk, layanan dan fasilitas yang berkualitas dan terpercaya bagi Nasabah dan Masyarakat serta selalu mengedepankan kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi, pengelolaan risiko dan finansial yang baik hingga mampu mendukung pertumbuhan bisnis dan ekspansi perusahaan ke depan.

4.1.6 BANK BUKOPIN SYARIAH

Bank Syariah Bukopin adalah lembaga keuangan yang berjenis Jasa Keuangan Perbankan. Sebagai salah satu bank nasional di Indonesia, sejarah Perseroan dimulai pada 1990 dengan meleburnya 2 (dua) bank pasar, yakni BPR Gunung Sindoro dan BPR Gunung Kendeng di Samarinda, Kalimantan Timur. Proses peleburan ini termaktub dalam Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990. Dengan peleburan ini, statusnya pun meningkat menjadi bank umum dengan nama PT Bank Swansarindo International. Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 24/I/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991, PT Bank Swansarindo International memperoleh izin usaha sebagai bank umum dan pemindahan kantor pusat ke Jakarta.

Dalam perkembangannya, atas dasar pertimbangan bisnis pada akhir 2002, Muhammadiyah, salah satu organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, mengakuisisi PT Bank Swansarindo International untuk dikembangkan menjadi bank Syariah. Dengan persetujuan Bank Indonesia (BI) yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 dan dituangkan dalam Akta Nomor 109 tanggal 31 Januari 2003, PT Bank Swansarindo International berubah nama menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia.

Untuk mengembangkan bisnis perusahaan, selama 2005-2008 PT Bank Bukopin, Tbk. terlibat dalam asistensi kegiatan operasional PT Bank Persyarikatan Indonesia. Tambahan modal juga diberikan PT Bank Bukopin, Tbk. untuk

memperkuat bisnis PT Bank Persyarikatan Indonesia. Setelah beberapa tahun di bawah asistensi PT Bank Bukopin, Tbk. dan melihat peluang bisnis di perbankan syariah, PT Bank Persyarikatan Indonesia mengubah arah bisnisnya dari bank konvensional menjadi bank syariah. Izin usaha berdasarkan prinsip syariah pun diperoleh dari Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/69/ KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan pada tanggal 11 Desember 2008 telah diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Atas dasar surat keputusan tersebut, nama PT Bank Persyarikatan Indonesia berubah menjadi PT Bank Syariah Bukopin. Secara resmi Perseroan melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah pada Selasa, 11 Zulhijah 1430 H atau 9 Desember 2008.

Operasional Bank Bukopin kini didukung oleh lebih dari 280 kantor yang tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia yang terhubung secara *real time on-line*. Bank Bukopin juga telah membangun jaringan *micro-banking* yang diberi nama “Swamitra”, yang kini berjumlah 543 outlet, sebagai wujud program kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro. Dengan struktur permodalan yang semakin kokoh sebagai hasil pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) pada bulan Juli 2006, Bank Bukopin terus mengembangkan program operasionalnya dengan menerapkan skala prioritas sesuai strategi jangka pendek yang telah disusun dengan matang. Penerapan strategi tersebut ditujukan untuk menjamin dipenuhinya layanan perbankan yang komprehensif kepada nasabah melalui jaringan yang terhubung secara nasional maupun internasional, produk yang beragam serta mutu pelayanan dengan standar yang tinggi.

Komitmen penuh dari PT Bank Bukopin Tbk sebagai pemegang saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikan PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank syariah dengan pelayanan terbaik. Dan pada tanggal 10 Juli 2009 melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan Hak dan Kewajiban Usaha Syariah-nya kedalam PT Bank Syariah Bukopin.

Keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada akhirnya berujung pada sasaran terciptanya citra Bank Bukopin sebagai lembaga perbankan yang terpercaya dengan struktur keuangan yang kokoh, sehat dan efisien. Keberhasilan membangun kepercayaan tersebut akan mampu membuat Bank Bukopin tetap tumbuh memberi hasil terbaik secara berkelanjutan.

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Perkembangan *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Per Triwulan 2013-2014

Berikut disajikan tabel dan grafik mengenai perkembangan *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia per triwulan 2013-2014.

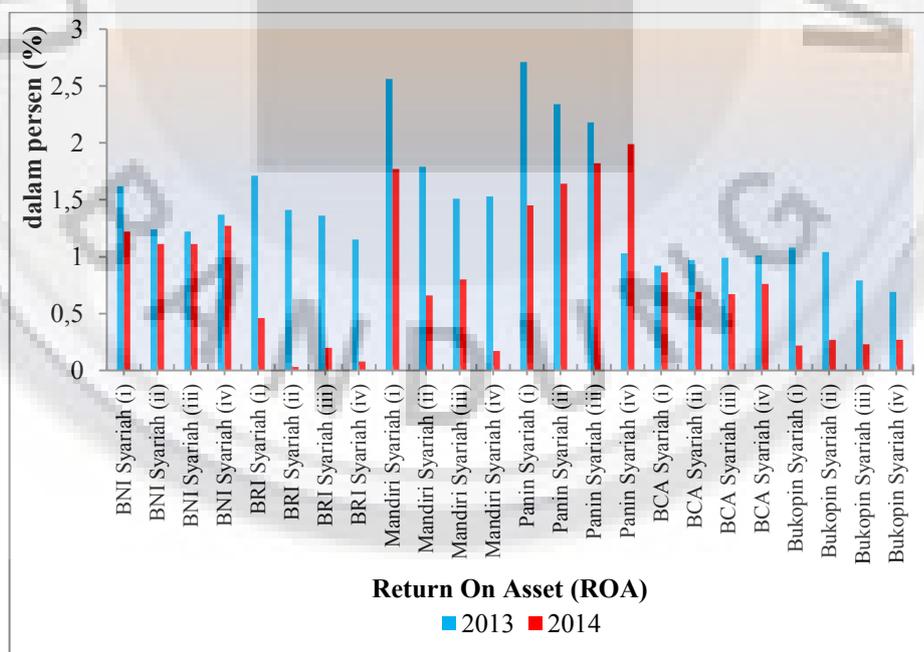
Tabel 4.1
***Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Per Triwulan 2013-2014**

Nama Bank	Triwulan	Return On Asset (ROA)	
		2013	2014
BNI Syariah	i	1,62	1,22
	ii	1,24	1,11
	iii	1,22	1,11
	iv	1,37	1,27
BRI Syariah	i	1,71	0,46
	ii	1,41	0,03
	iii	1,36	0,2
	iv	1,15	0,08
Mandiri Syariah	i	2,56	1,77
	ii	1,79	0,66

Nama Bank	Triwulan	Return On Asset (ROA)	
		2013	2014
	iii	1,51	0,8
	iv	1,53	0,17
Panin Syariah	i	2,71	1,45
	ii	2,34	1,64
	iii	2,18	1,82
	iv	1,03	1,99
BCA Syariah	i	0,92	0,86
	ii	0,97	0,69
	iii	0,99	0,67
	iv	1,01	0,76
Bukopin Syariah	i	1,08	0,22
	ii	1,04	0,27
	iii	0,79	0,23
	iv	0,69	0,27
Rata-Rata	-	1,43	0,82
Tertinggi	-	2,71	1,99
Terendah	-	0,69	0,03

Sumber: Hasil Pengolahan Data (Laporan Keuangan)

Jika disajikan dalam bentuk grafik, data *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia per triwulan 2013-2014 akan tampak sebagai berikut:



Gambar 4.1
Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Per Triwulan 2013-2014

Berdasarkan gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia per triwulan 2013-2014 cenderung mengalami penurunan. Interpretasi lebih lengkap mengenai data di atas adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2013, nilai rata-rata *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah sebesar 1,43% dengan *return on asset* (ROA) tertinggi mencapai angka 2,71% dimiliki oleh Panin Syariah pada triwulan pertama, sedangkan nilai *return on asset* (ROA) terendah mencapai angka 0,69% dimiliki oleh Bukopin Syariah pada triwulan keempat.
2. Pada tahun 2014, nilai rata-rata *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah sebesar 0,82% dengan *return on asset* (ROA) tertinggi mencapai angka 1,99% dimiliki oleh Panin Syariah pada triwulan keempat, sedangkan nilai *return on asset* (ROA) terendah mencapai angka 0,03% dimiliki oleh BRI Syariah pada triwulan keempat.

4.2.2 Perkembangan Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Per Triwulan 2013-2014

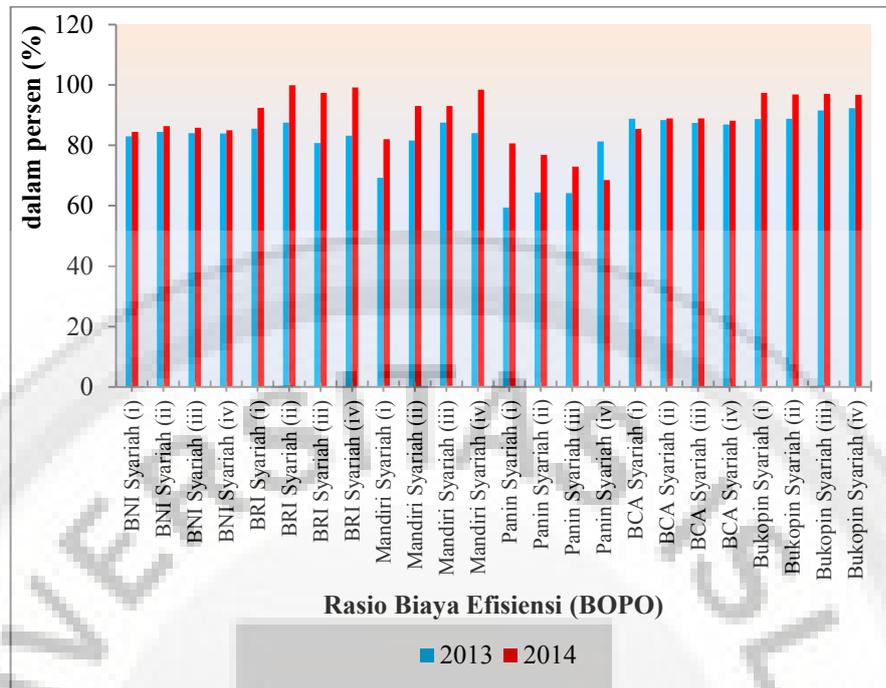
Berikut disajikan tabel dan grafik mengenai perkembangan biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) pada Bank Umum Syariah di Indonesia per triwulan 2013-2014.

Tabel 4.2
Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) pada Bank Umum
Syariah di Indonesia Per Triwulan 2013-2014

Nama Bank	Triwulan	Rasio Biaya Efisiensi (BOPO)	
		2013	2014
BNI Syariah	i	82,95	84,51
	ii	84,44	86,32
	iii	84,06	85,85
	iv	83,94	85,03
BRI Syariah	i	85,54	92,43
	ii	87,55	99,84
	iii	80,8	97,35
	iv	83,23	99,14
Mandiri Syariah	i	69,24	81,99
	ii	81,63	93,03
	iii	87,53	93,02
	iv	84,03	98,46
Panin Syariah	i	59,42	80,67
	ii	64,34	76,9
	iii	64,17	72,9
	iv	81,31	68,47
BCA Syariah	i	88,76	85,37
	ii	88,36	88,95
	iii	87,46	88,95
	iv	86,91	88,11
Bukopin Syariah	i	88,67	97,33
	ii	88,82	96,83
	iii	91,5	97,08
	iv	92,29	96,73
Rata-Rata	-	82,37	88,97
Tertinggi	-	92,29	99,84
Terendah	-	59,42	68,47

Sumber: Hasil Pengolahan Data (Laporan Keuangan)

Jika disajikan dalam bentuk grafik, data (BOPO) pada Bank Umum Syariah di Indonesia per triwulan 2013-2014 akan tampak sebagai berikut:



Gambar 4.2
(BOPO) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Per Triwulan 2013-2014

Pada gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa nilai (BOPO) pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia per triwulan 2013-2014 cenderung mengalami peningkatan. Interpretasi lebih lengkap mengenai data di atas adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2013, nilai rata-rata rasio biaya efisiensi (BOPO) pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah sebesar 82,37% dengan rasio biaya efisiensi (BOPO) tertinggi mencapai angka 92,29% dimiliki oleh Bukopin Syariah pada triwulan keempat, sedangkan rasio biaya efisiensi (BOPO) terendah yaitu 59,42% dimiliki oleh Panin Syariah pada triwulan pertama.
2. Pada tahun 2014, nilai rata-rata rasio biaya efisiensi (BOPO) pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah sebesar 88,97% dengan rasio biaya efisiensi (BOPO) tertinggi mencapai 99,84% dimiliki oleh BRI Syariah

pada triwulan kedua, sedangkan rasio biaya efisiensi (BOPO) terendah mencapai angka 68,47% dimiliki Panin Syariah pada triwulan keempat.

4.2.3 Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Per Triwulan 2013-2014

Berikut disajikan tabel dan grafik mengenai perkembangan *financing to deposit ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia per triwulan 2013-2014.

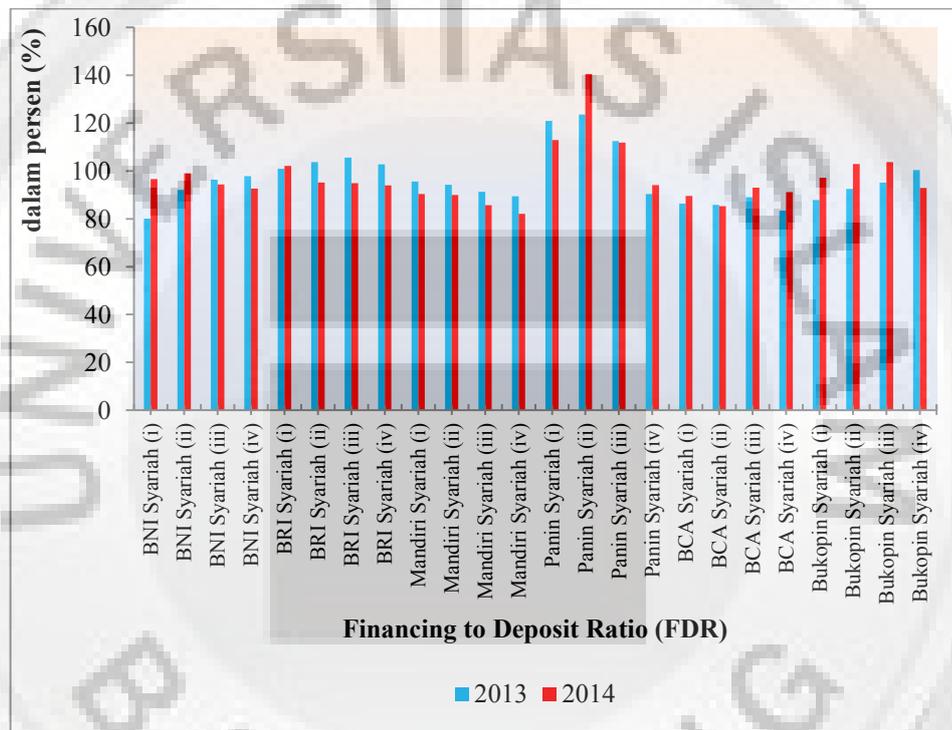
Tabel 4.3
***Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Per Triwulan 2013-2014**

Nama Bank	Triwulan	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	
		2013	2014
BNI Syariah	i	80,11	96,67
	ii	92,13	98,96
	iii	96,37	94,29
	iv	97,86	92,58
BRI Syariah	i	100,9	102,13
	ii	103,67	95,14
	iii	105,61	94,85
	iv	102,7	93,9
Mandiri Syariah	i	95,61	90,34
	ii	94,22	89,91
	iii	91,29	85,68
	iv	89,37	82,13
Panin Syariah	i	120,91	112,84
	ii	123,6	140,48
	iii	112,46	111,79
	iv	90,4	94,04
BCA Syariah	i	86,35	89,53
	ii	85,86	85,31
	iii	88,98	93,02
	iv	83,48	91,17
Bukopin Syariah	i	87,8	97,14
	ii	92,43	102,84
	iii	95,15	103,66
	iv	100,29	92,89
Rata-Rata	-	96,56	97,14
Tertinggi	-	123,60	140,48

Nama Bank	Triwulan	Financing to Deposit Ratio (FDR)	
		2013	2014
Terendah	-	80,11	82,13

Sumber: Hasil Pengolahan Data (Laporan Keuangan)

Jika disajikan dalam bentuk grafik, data *financing to deposit ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia per triwulan 2013-2014 akan tampak sebagai berikut:



Gambar 4.3
Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Per Triwulan 2013-2014

Pada gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa nilai *financing to deposit ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia per triwulan 2013-2014 cenderung mengalami fluktuatif. Interpretasi lebih lengkap mengenai data di atas adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2013, nilai rata-rata *financing to deposit ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia adalah sebesar 96,56% dengan

financing to deposit ratio (FDR) tertinggi mencapai 123,60% dimiliki oleh Panin Syariah pada triwulan kedua, sedangkan *financing to deposit ratio* (FDR) terendah mencapai angka 80,11% dimiliki oleh BNI Syariah pada triwulan pertama.

2. Pada tahun 2014, nilai rata-rata *financing to deposit ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia adalah sebesar 97,14% dengan *financing to deposit ratio* (FDR) tertinggi mencapai 140,48% dimiliki oleh Panin Syariah pada triwulan kedua, sedangkan *financing to deposit ratio* (FDR) terendah mencapai angka 82,13% dimiliki oleh Mandiri Syariah pada triwulan keempat.

4.2.4 Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Per Triwulan 2013-2014

Berikut disajikan tabel dan grafik mengenai perkembangan bagi hasil tingkat mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia per triwulan 2013-2014.

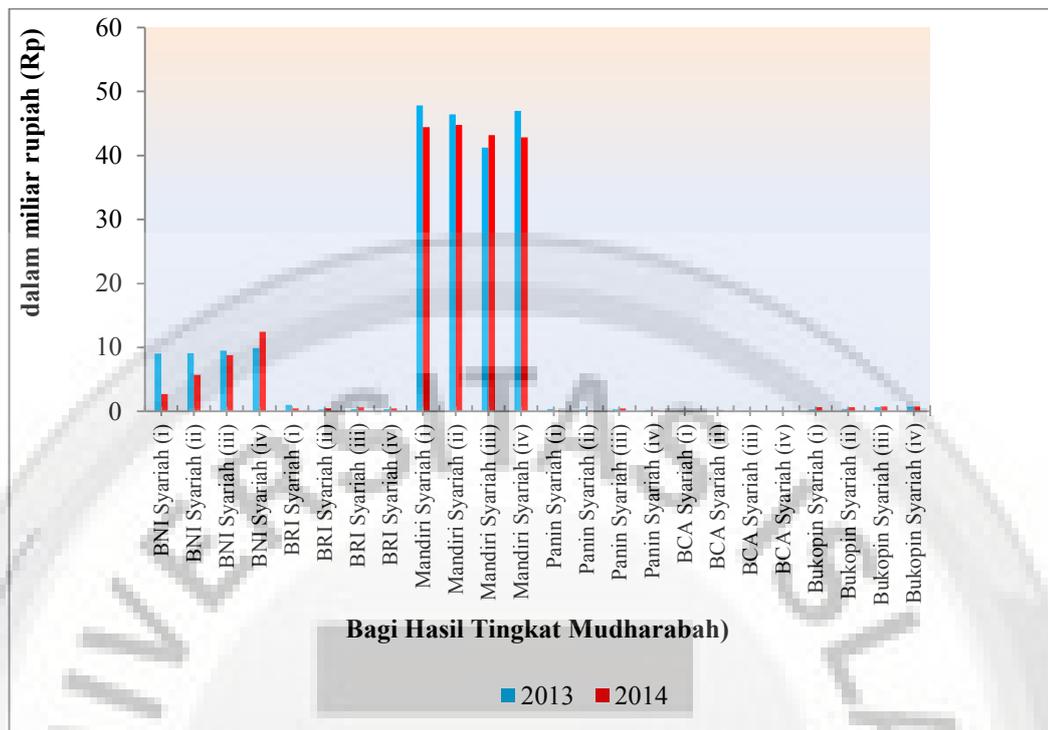
Tabel 4.4
Perkembangan Jumlah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Per Triwulan 2013-2014

Nama Bank	Triwulan	Bagi Hasil Tingkat Mudharabah		Persentase Peningkatan	
		2013	2014	2013	2014
BNI Syariah	iv 2012	Rp7.902.000.000			
	i	Rp9.057.000.000	Rp2.686.000.000	0,146	-0,729
	ii	Rp9.089.000.000	Rp5.704.000.000	0,003	1,123
	iii	Rp9.493.000.000	Rp8.820.000.000	0,044	0,546
	iv	Rp9.915.000.000	Rp12.453.000.000	0,044	0,411
	iv 2012	Rp2.850.000.000			

Nama Bank	Triwulan	Bagi Hasil Tingkat Mudharabah		Persentase Peningkatan	
		2013	2014	2013	2014
BRI Syariah	i	Rp1.018.000.000	Rp446.000.000	-0,642	0,192
	ii	Rp337.000.000	Rp461.000.000	-0,669	0,336
	iii	Rp353.000.000	Rp611.000.000	0,047	0,325
	iv	Rp374.000.000	Rp453.000.000	0,059	-258
Mandiri Syariah	iv 2012	Rp48.298.748.000			
	i	Rp47.801.021.000	Rp44.409.416.000	-0,01	-0,054
	ii	Rp46.418.441.000	Rp44.796.471.000	-0,029	0,008
	iii	Rp41.216.276.000	Rp43.186.744.000	-0,112	-0,036
	iv	Rp46.971.564.000	Rp42.852.266.000	0,14	-0,008
Panin Syariah	iv 2012	Rp61.000.000			
	i	Rp362.000.000	Rp159.000.000	4,934	-0,22
	ii	Rp314.000.000	Rp120.000.000	-0,132	-0,245
	iii	Rp308.000.000	Rp445.000.000	-0,02	2,708
	iv	Rp204.000.000	Rp210.000.000	-0,338	-0,528
BCA Syariah	iv 2012	Rp143.000.000			
	i	Rp76.000.000	Rp74.000.000	-0,468	-0,075
	ii	Rp81.000.000	Rp195.000.000	0,066	1,635
	iii	Rp73.000.000	Rp74.000.000	-0,099	-0,62
	iv	Rp80.000.000	Rp65.000.000	0,096	-0,0121
Bukopin Syariah	iv 2012	Rp352.162.000			
	i	Rp332.158.000	Rp676.469.000	-0,057	-0,029
	ii	Rp321.618.000	Rp685.689.000	-0,032	0,014
	iii	Rp659.106.000	Rp753.121.000	1,049	-0,098
	iv	Rp696.410.000	Rp741.153.000	0,05	-0,016
Rata-Rata	-	Rp9.397.941.417	Rp8.794.888.708	0,169	-10,557
Tertinggi	-	Rp47.801.021.000	Rp44.796.471.000		
Terendah	-	Rp73.000.000	Rp65.000.000		

Sumber: Hasil Pengolahan Data (Laporan Keuangan)

Jika disajikan dalam bentuk grafik, data bagi hasil tingkat mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia per triwulan 2013-2014 akan tampak sebagai berikut:



Gambar 4.4
Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Per Triwulan 2013-2014

Pada gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa nilai bagi hasil tingkat mudharabah pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia per triwulan 2013-2014 cenderung mengalami fluktuatif. Interpretasi lebih lengkap mengenai data di atas adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2013, nilai rata-rata bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia adalah sebesar Rp9.397.941.417 dengan bagi hasil tabungan mudharabah tertinggi mencapai angka sebesar Rp47.801.021.000 dimiliki oleh Mandiri Syariah pada triwulan pertama, sedangkan nilai bagi hasil tingkat mudharabah terendah mencapai angka sebesar Rp73.000.000 dimiliki oleh BCA Syariah pada triwulan ketiga.

2. Pada tahun 2014, nilai rata-rata bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia adalah sebesar Rp8.794.888.708 dengan bagi hasil tabungan mudharabah tertinggi mencapai angka sebesar Rp44.796.471.000 dimiliki oleh Mandiri Syariah pada triwulan kedua, sedangkan nilai bagi hasil tingkat mudharabah terendah mencapai angka sebesar Rp65.000.000 dimiliki oleh BCA Syariah pada triwulan keempat.

4.3 Analisis Model Regresi dan Pengujian Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis konseptual yang diajukan, akan di analisis menggunakan regresi linier berganda. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh *retrun on asset* (ROA), rasio biaya efisiensi (BOPO) dan *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap bagi hasil tingkat mudharabah. Data dalam penelitian diperoleh dari laporan keuangan dari 6 Bank Umum Syariah di Indonesia yang diukur per triwulan selama dua tahun sehingga terdapat 48 unit data. Dalam melakukan perhitungan koefisien regresi, peneliti memanfaatkan *software* SPSS 21.0.

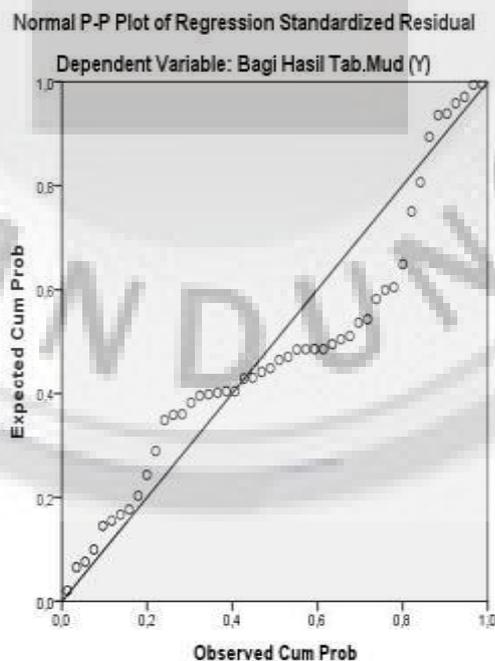
4.3.1 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid, data yang digunakan secara teori tidak bias, konsisten dan penaksiran koefisienan regresinya efisien, sehingga hasil regresi yang terbentuk memenuhi kriteria BLUE yakni *best linier unbiased estimated*. Pada penelitian

ini, asumsi regresi yang dilihat adalah asumsi error mengikuti distribusi normal, asumsi bebas kolinearitas, asumsi tidak terdapat heteroskedastis dan asumsi bebas autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki residu yang berdistribusi secara normal. Secara visual, uji normalitas residu dapat dideteksi pada gambar grafik *probability plots* dengan kriteria pengujian jika *observed* (data residu) menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki residu yang berdistribusi secara normal. Dengan menggunakan *software* SPSS, diperoleh grafik *probability plots* seperti berikut:



Gambar 4.5
Grafik *Probability Plots*

Pada gambar grafik *probability plots* di atas, dapat dilihat bahwa *observed* (data residu) menyebar disekitar garis serta mengikuti arah garis diagonal, hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang akan dibentuk memiliki residu yang berdistribusi secara normal.

Untuk memperkuat hasil pengujian secara visual yang tersaji pada grafik *probability plots* di atas, dapat digunakan uji *kolmogorov-smirnov*. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residu dalam model regresi berdistribusi secara normal. Dengan menggunakan *software* SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	13,06963850
Most Extreme Differences	Absolute	,185
	Positive	,185
	Negative	-,115
Kolmogorov-Smirnov Z		1,281
Asymp. Sig. (2-tailed)		,075

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan *Software* SPSS

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas yang diperoleh adalah sebesar 0,488 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa residu dalam model berdistribusi secara normal, sehingga model memenuhi salah satu asumsi untuk dilakukan pengujian regresi.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam model regresi linier berganda saling berkorelasi sempurna dengan variabel bebas lainnya. Model regresi linier berganda yang baik seharusnya terbebas dari masalah multikolinearitas. Untuk mendeteksi masalah multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance value serta nilai VIF. Jika nilai tolerance value $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam model regresi linier berganda terbebas dari masalah multikolinearitas. Dengan menggunakan *software* SPSS, diperoleh hasil uji sebagai berikut :

Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	ROA (X1)	0,115	8,711
	BOPO (X2)	0,102	9,776
	FDR (X3)	0,704	1,421

a. Dependent Variable: Bagi Hasil Tab.Mud (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan *Software* SPSS

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa ketiga variabel bebas memiliki nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* kurang dari 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi, sehingga model memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variance dari residual data satu observasi ke observasi lainnya berbeda ataukah

tetap. Model regresi yang baik harusnya terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Jika variance residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat digunakan korelasi *rank spearman* dengan cara mengkorelasikan variabel bebas dengan nilai *absolute residual* (Abs_Res). Apabila nilai signifikansi (*Sig.*) yang diperoleh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Dengan menggunakan *software* SPSS, diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Heteroskedastisitas
Correlations

		Abs Res
Spearman's rho	ROA	Correlation Coefficient
		Sig. (2-tailed)
		N
BOPO		Correlation Coefficient
		Sig. (2-tailed)
		N
FDR		Correlation Coefficient
		Sig. (2-tailed)
		N

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan *Software* SPSS

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa ketiga variabel bebas memiliki nilai signifikansi (*Sig.*) yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model terbebas dari adanya heteroskedastisitas, sehingga model memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada data observasi satu pengamatan kepengamatan lainnya dalam model regresi linier. Model regresi yang baik adalah model yang terbebas dari masalah autokorelasi. Autokorelasi dapat di deteksi dari nilai *Durbin-Watson* dengan kriteria pengujian jika nilai *dW* berada diantara angka *dU* dan $4-dU$, dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi. Mengacu pada tabel *durbin-watson* dengan $\alpha = 5\%$, banyaknya data pengamatan (n) 48 data dan banyaknya variabel bebas (k) = 3, diperoleh nilai $dU = 1,674$ dan $4-dU (1,674) = 2,326$. Dengan menggunakan *software* SPSS, diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2,416

b. Dependent Variable: Bagi Hasil

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan *Software* SPSS

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh adalah sebesar 2,416 dan berada diantara angka dU dan $4-dU$ ($1,674 < 2,416 < 2,326$). Hasil tersebut menunjukkan jika model regresi yang akan dibentuk terbebas dari adanya autokorelasi, sehingga model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

4.3.2 Hasil Estimasi Model Regresi Linier Berganda

Untuk menjawab hipotesis konseptual akan dilakukan analisis statistik menggunakan metode regresi linier berganda. Berdasarkan data *retrun on asset*

(ROA), biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO), *financing to deposit ratio* (FDR) dan bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum di Indonesia, diperoleh estimasi regresi linier berganda dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations
	B	Std. Error	Beta			Zero-order
1 (Constant)	-175,459	76,256		-2,301	0,026	
ROA (X1)	36,635	8,984	1,443	4,078	0,000	0,191
BOPO (X2)	2,145	0,665	1,210	3,226	0,002	0,002
FDR (X3)	-0,417	0,208	-0,286	-2,000	0,052	-0,309

a. Dependent Variable: Bagi Hasil Tab.Mud (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan *Software SPSS*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persamaan regresi berganda untuk data penelitian yang digunakan ini adalah sebagai berikut:

$$Y = -175,459 + 36,635 (\text{ROA}) + 2,145 (\text{BOPO}) - 0,417 (\text{FDR})$$

Dari persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa konstanta (α) sebesar -175,459 menunjukkan nilai bagi hasil tabungan mudharabah pada bank syariah ketika variabel independen (ROA, BOPO dan FDR) tidak berubah atau pada kondisi konstan (bernilai 0).

Koefisien regresi untuk *return on asset* (ROA) adalah sebesar 36,635 dan bertanda positif, artinya apabila *return on asset* (ROA) mengalami peningkatan sebesar 1% dan variabel independen lain tidak mengalami perubahan (konstan), maka bagi hasil tabungan mudharabah akan meningkat sebesar 36,635 miliar rupiah.

Koefisien regresi untuk biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) adalah sebesar 2,145 dan bertanda positif, artinya apabila biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) mengalami peningkatan sebesar 1% dan variabel independen lain tidak mengalami perubahan (konstan), maka bagi hasil tabungan mudharabah akan meningkat sebesar 2,145 miliar rupiah.

Koefisien regresi untuk *financing to deposit ratio* (FDR) sebesar -0,417 dan bertanda negatif, artinya jika *financing to deposit ratio* (FDR) mengalami peningkatan sebesar 1% dan variabel independen lain tidak mengalami perubahan (konstan), maka bagi hasil tabungan mudharabah akan menurun sebesar 0,417 miliar rupiah.

4.3.3 Pengujian Hipotesis Simultan

Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen (ROA, BOPO dan FDR) secara bersama-sama terhadap variabel dependen yakni bagi hasil tabungan mudharabah, maka dilakukan pengujian hipotesis (uji F) dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \beta_i = 0$ Secara simultan *retrun on asset* (ROA), biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) dan *financing to deposit ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tingkat mudharabah pada Bank Umum Syariah.

$H_a : \beta_i \neq 0$ Secara simultan *retrun on asset* (ROA), biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) dan *financing*

to deposit ratio (FDR) berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tingkat mudharabah pada Bank Umum Syariah.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah sebesar 0,05 atau 5%.

Untuk menguji hipotesis diatas digunakan statistik uji-F yang diperoleh melalui tabel anova seperti yang tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil ANOVA (Uji F)
ANOVA^a

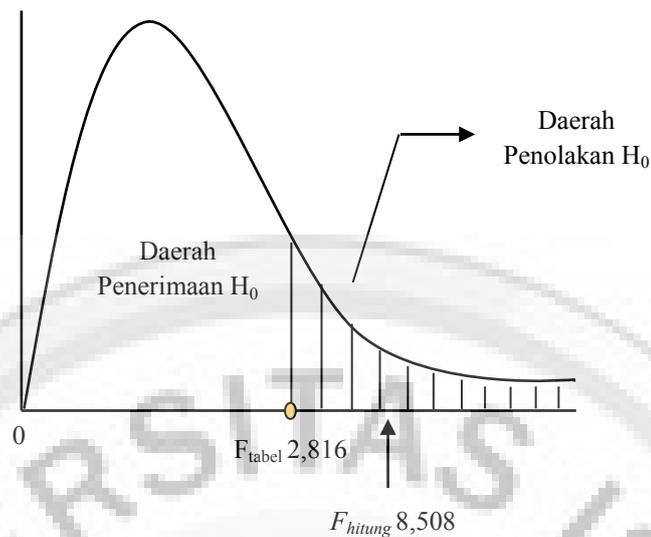
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4656,965	3	1552,322	8,508	0,000 ^b
	Residual	8028,326	44	182,462		
	Total	12685,292	47			

a. Dependent Variable: Bagi Hasil Tab.Mud (Y)

b. Predictors: (Constant), FDR (X3), ROA (X1), BOPO (X2)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan *Software* SPSS

Pada tabel diatas dapat, terlihat nilai F_{hitung} untuk model regresi yang diperoleh sebesar 8,508 dengan nilai signifikansi (*Sig.*) sebesar 0,000. Nilai F_{hitung} yang diperoleh akan dibandingkan dengan F_{tabel} yang diperoleh dari tabel distribusi F. Dengan db_1 (banyaknya variabel independen) = 3 dan db_2 ($n - k - 1$ atau $48-3-1$) = 44 sebesar 2,816. Hasil perbandingan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dapat dilihat pada kurva hipotesis simultan sebagai berikut:



Gambar 4.7
Kurva Pengujian Hipotesis Simultan

Pada gambar kurva pengujian hipotesis simultan di atas, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 8,508 berada didaerah penolakan H_0 ($F_{hitung} > F_{tabel}$) sehingga diperoleh keputusan uji simultan adalah menolak H_0 dan menerima H_a . Dari nilai signifikansi juga dapat dilihat bahwa nilai signifikansi ($Sig. = 0,000$) lebih kecil dari 0,05.

Hasil tersebut menunjukan bahwa secara simultan *retrun on asset* (ROA), biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) dan *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4.3.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan nilai yang menunjukkan besar kontribusi pengaruh yang diberikan *retrun on asset* (ROA), biaya operasional/pendapatan

operasional (BOPO) dan *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah. Dengan menggunakan *software* SPSS, diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi Simultan
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,606 ^a	0,367	0,324	13,50785

a. Predictors: (Constant), FDR (X3), ROA (X1), BOPO (X2)

b. Dependent Variable: Bagi Hasil Tab.Mud (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan *Software* SPSS

Pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,367 atau sebesar 36,7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *retrun on asset* (ROA), biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) dan *financing to deposit ratio* (FDR) memberikan kontribusi sebesar 36,7% terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah, sedangkan sebanyak $(1-R^2)$ 63,3% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Untuk mengetahui besar kontribusi pengaruh parsial, dapat diketahui dari hasil perkalian antara nilai beta yang merupakan koefisien regresi terstandarkan atau *standardized coefficients* dengan nilai *zero-order* yang merupakan korelasi parsial. Hasil perhitungan koefisien determinasi secara parsial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Koefisien Determinasi Parsial
Coefficientsa

Model	Standardized Coefficients	Correlations	Partial Coefficient of Determination
	Beta	Zero-order	
1 ROA	1,443	0,191	27,6%
BOPO	1,210	0,002	0,2%
FDR	-0,286	-0,309	8,8%
Total Effect			36,7%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan *Software* SPSS

Tabel di atas memberikan informasi mengenai hasil pengujian koefisien determinasi secara parsial. Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara parsial *return on asset* (ROA) memberikan pengaruh sebesar 27,6%. Untuk biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) memberikan pengaruh parsial sebesar 0,2%, sedangkan *financing to deposit ratio* (FDR) hanya memberikan pengaruh sebesar 8,8% sehingga total pengaruh yang diberikan oleh ketiganya adalah sebesar 36,7%.

4.3.5 Pengujian Hipotesis Parsial

Untuk menguji signifikansi pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan uji t. Kriteria pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut:

- a. Tolak H_0 dan terima H_a jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$
- b. Terima H_0 dan tolak H_a jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

Nilai t_{tabel} dengan jumlah data (n) sebanyak 48, variabel independen (k) = 3, taraf signifikan $\alpha = 5\%$; derajat bebas (db) = $n-k-1$ atau $48-3-1 = 44$ untuk pengujian dua pihak (*two tailed*) diperoleh t_{tabel} sebesar 2,015.

Rangkuman hasil perhitungan uji t pada pengujian hipotesis parsial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Uji t (Parsial)

Variabel	t_{hitung}	Sig.	t_{tabel}	α	Keputusan	Keterangan
ROA	4,078	0,000	2,015	0,05	Ho ditolak	Signifikan
BOPO	3,226	0,002	2,015	0,05	Ho ditolak	Signifikan
FDR	-2,000	0,052	-2,015	0,05	Ho diterima	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan *Software* SPSS

Interpretasi untuk tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel di atas memberikan informasi mengenai hasil pengujian Uji t parsial variabel X dengan detail pengaruh signifikansi masing-masing variabel sebagai berikut: *return on asset* (ROA) $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka HO ditolak dan berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tabungan mudharabah. Biaya operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka HO ditolak dan berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tabungan mudharabah. Dan *financing to deposit ratio* (FDR) $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka HO diterima dan tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tabungan mudharabah.

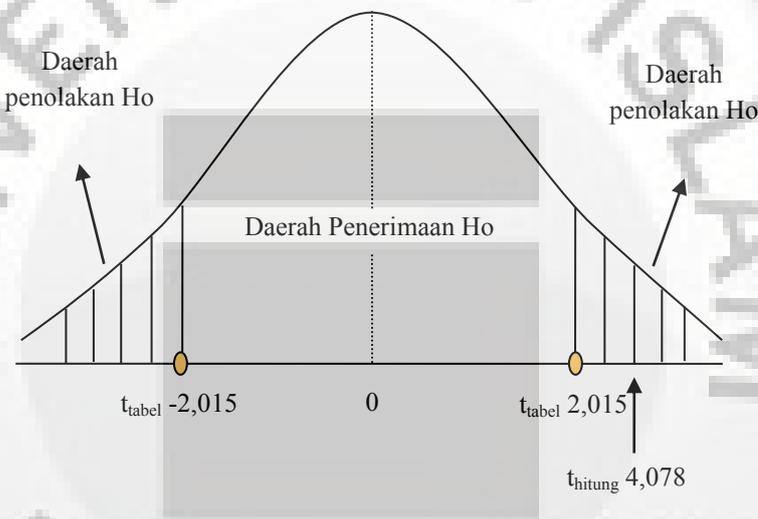
4.3.5.1 Pengaruh *Retrun On Asset* (ROA) Terhadap Bagi Hasil Tingkat Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia

Rumusan hipotesis parsial yang diuji adalah sebagai berikut:

Ho : $\beta_1 = 0$ Secara parsial *retrun on asset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ Secara parsial *retrun on asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji pada tabel di atas, diketahui nilai t_{hitung} untuk *retrun on asset* (ROA) sebesar 4,078 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Untuk melihat daerah penerimaan ataupun daerah penolakan H_0 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.8
Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Pengaruh *Retrun On Asset* (ROA) Terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Pada gambar kurva pengujian hipotesis parsial di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,078 berada didaerah penolakan H_0 ($t_{hitung} > t_{tabel}$) sehingga diperoleh keputusan uji parsial adalah menolak H_0 dan menerima H_a . Dari nilai signifikansi juga dapat dilihat bahwa nilai *Sig.* (0,000) lebih kecil dari 0,05.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa secara parsial *retrun on asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tingkat mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia.

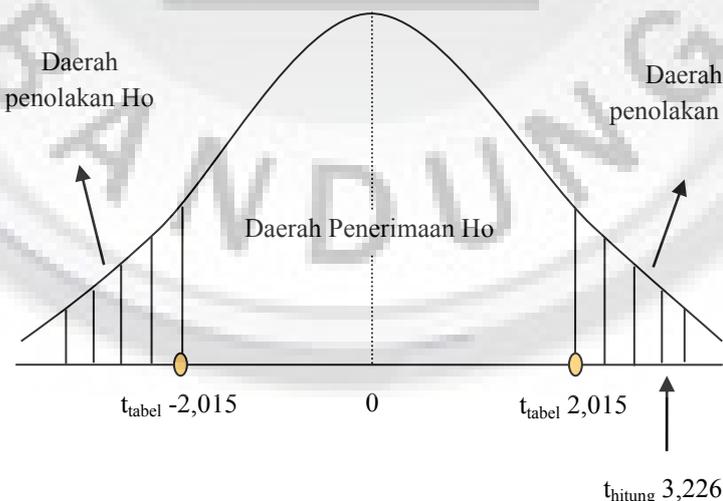
4.3.5.2 Pengaruh Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia

Rumusan hipotesis parsial yang diuji adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_2 = 0$ Secara parsial biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia.

$H_a : \beta_2 \neq 0$ Secara parsial biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji pada tabel di atas, diketahui nilai t_{hitung} untuk biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) adalah sebesar 0,002 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Untuk melihat daerah penerimaan ataupun daerah penolakan H_0 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.9
Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Pengaruh Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Pada gambar kurva pengujian hipotesis parsial di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,226 berada didaerah penolakan H_0 ($t_{hitung} > t_{tabel}$) sehingga diperoleh keputusan uji parsial adalah menolak H_0 dan menerima H_a . Dari nilai signifikansi juga dapat dilihat bahwa nilai *Sig.* (0,002) lebih kecil dari 0,05.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa secara parsial biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia.

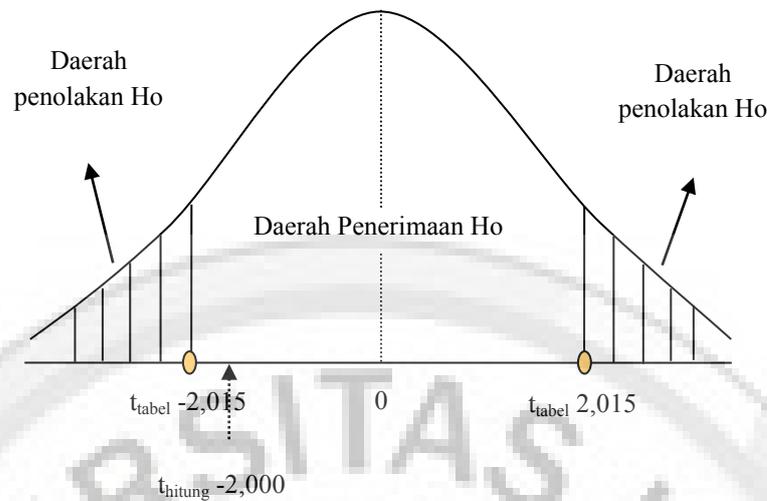
4.3.5.3 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia

Rumusan hipotesis parsial yang diuji adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_2 = 0$ Secara parsial *financing to deposit ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia.

$H_a : \beta_2 \neq 0$ Secara parsial *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji pada tabel di atas, diketahui nilai t_{hitung} untuk *financing to deposit ratio* (FDR) adalah sebesar -0,327 dengan nilai signifikansi sebesar 0,052. Untuk melihat daerah penerimaan ataupun daerah penolakan H_0 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.10
Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Bagi Hasil Tingkat Mudharabah

Pada gambar kurva pengujian hipotesis parsial di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar -2,000 berada didaerah penerimaan Ho ($-t_{hitung} > -t_{tabel}$) sehingga diperoleh keputusan uji parsial adalah menerima Ho dan menolak Ha. Dari nilai signifikansi juga dapat dilihat bahwa nilai Sig. (0,052) lebih besar dari 0,05.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa secara parsial *financing to deposit ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia.

4.4 Pembahasan

4.4.1 *Return on Asset* (ROA) terhadap pada Bank Umum Syariah

ROA adalah ukuran efektifitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia untuk menghasilkan laba dari modal yang di investasikan. Dibawah ini merupakan perhitungan profitabilitas yang diukur dengan *return on asset* (ROA) pada 6 Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel 4.14
Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Per
Triwulan 2013-2014

Nama Bank	Triwulan	Return On Asset (ROA)	
		2013	2014
BNI Syariah	i	1,62	1,22
	ii	1,24	1,11
	iii	1,22	1,11
	iv	1,37	1,27
BRI Syariah	i	1,71	0,46
	ii	1,41	0,03
	iii	1,36	0,2
	iv	1,15	0,08
Mandiri Syariah	i	2,56	1,77
	ii	1,79	0,66
	iii	1,51	0,8
	iv	1,53	0,17
Panin Syariah	i	2,71	1,45
	ii	2,34	1,64
	iii	2,18	1,82
	iv	1,03	1,99
BCA Syariah	i	0,92	0,86
	ii	0,97	0,69
	iii	0,99	0,67
	iv	1,01	0,76
Bukopin Syariah	i	1,08	0,22
	ii	1,04	0,27
	iii	0,79	0,23
	iv	0,69	0,27
Rata-Rata	-	1,43	0,82
Tertinggi	-	2,71	1,99
Terendah	-	0,69	0,03

Sumber: Hasil Pengolahan Data (Laporan Keuangan)

Jika dilihat pada tahun 2013 dan 2014, ke-6 Bank Umum Syariah tersebut mengalami fluktuatif. Secara umum perkembangan *return on asset* (ROA) Bank Umum Syariah tahun 2013 lebih baik dibandingkan tahun 2014 dimana rata-rata *return on asset* (ROA) 2013 adalah sebesar 1,43% dan 2014 sebesar 0,82%. Sementara itu ROA tertinggi pada tahun 2013 mencapai sebesar 2,71% dan 2014 hanya sebesar 1,99%. Kemudian *return on asset* (ROA) terendah 2013 hanya sebesar 0,69% sementara pada 2014 hanya sebesar 0,03%. Pada tahun 2013 ROA

tertinggi dicapai oleh Panin Syariah dengan triwulan I pada angka sebesar 2,71% kemudian terus mengalami penurunan pada triwulan II menjadi sebesar 2,34% , triwulan III sebesar 2,18% dan triwulan IV sebesar 1,03%. ROA terendah 2013 diraih oleh Bukopin syariah pada triwulan I sebesar 1,08% dan terus menurun pada triwulan berikutnya dengan nilai triwulan II sebesar 1,04%, triwulan III sebesar 0,79% dan triwulan IV sebesar 0,69%. Pada tahun 2014 ROA tertinggi dicapai oleh Panin syariah dengan nilai sebesar 1,99% pada triwulan IV, namun perkembangan sepanjang tahun 2013 dari triwulan I Panin syariah menunjukkan kenaikan dengan nilai pada triwulan I sebesar 1,45% dan triwulan II sebesar 1,64% dan triwulan III sebesar 1,82%. Kemudian ROA terendah dicapai oleh BRI Syariah dengan pergerakan ROA sepanjang tahun naik turun dengan nilai ROA triwulan I sebesar 0,46% dan triwulan II sebesar 0,03% dan triwulan III sebesar 0,2% dan triwulan IV sebesar 0,88%. *Return on Asset (ROA)* yang tinggi dapat disebabkan oleh perkembangan laba bersih yang cukup tinggi. Sedangkan *Return On Asset (ROA)* yang rendah dapat disebabkan karena alokasi dana yang terhimpun bank belum sepenuhnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan profit/laba bagi bank, ketidakseimbangan antara penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran dana, karena dana yang terhimpun akan mengendap dan tidak memperoleh laba, dan akhirnya akan berdampak terhadap penurunan *Return On Asset (ROA)* suatu bank, serta jumlah kredit yang bermasalah yang cukup besar juga akan mempengaruhi terhadap *Return On Asset* bank. Hal tersebut dikarenakan perolehan laba suatu bank umum syariah tergantung oleh sumber

dana yang diperoleh yang kemudian akan menghasilkan pendapatan dimana pendapatan tersebut akan menjadikan laba bagi bank umum syariah.

4.4.2 Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pada Bank Umum Syariah

BOPO adalah perbandingan Beban Operasional dengan Pendapatan Operasional yang hasil akhirnya adalah tingkat efisiensi dalam suatu operasional..

Berikut perhitungan BOPO pada 6 Bank Umum Syariah.

Tabel 4.15
Rasio Biaya Efisiensi (BOPO) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Per Triwulan 2013-2014

Nama Bank	Triwulan	Rasio Biaya Efisiensi (BOPO)	
		2013	2014
BNI Syariah	i	82,95	84,51
	ii	84,44	86,32
	iii	84,06	85,85
	iv	83,94	85,03
BRI Syariah	i	85,54	92,43
	ii	87,55	99,84
	iii	80,8	97,35
	iv	83,23	99,14
Mandiri Syariah	i	69,24	81,99
	ii	81,63	93,03
	iii	87,53	93,02
	iv	84,03	98,46
Panin Syariah	i	59,42	80,67
	ii	64,34	76,9
	iii	64,17	72,9
	iv	81,31	68,47
BCA Syariah	i	88,76	85,37
	ii	88,36	88,95
	iii	87,46	88,95
	iv	86,91	88,11
Bukopin Syariah	i	88,67	97,33
	ii	88,82	96,83
	iii	91,5	97,08
	iv	92,29	96,73
Rata-Rata	-	82,37	88,97
Tertinggi	-	92,29	99,84

Nama Bank	Triwulan	Rasio Biaya Efisiensi (BOPO)	
		2013	2014
Terendah	-	59,42	68,47

Jika dilihat pada tahun 2013 dan 2014, ke-6 Bank Umum Syariah secara keseluruhan, rasio efisiensi (BOPO) ini mengalami fluktuatif. Secara umum perkembangan rasio efisiensi (BOPO) Bank Umum Syariah 2013 lebih baik dibandingkan tahun 2014 dimana rata-rata biaya operasional/pendapatan operasional adalah sebesar 82,37% dan 2014 sebesar 88,97%. Karena untuk nilai BOPO yang terendah dapat dikatakan lebih baik dibanding nilai BOPO yang tertinggi. BOPO tertinggi pada tahun 2014 sebesar 99,84% dan tahun 2013 hanya sebesar 92,29%. Kemudian BOPO yang terendah pada tahun 2014 sebesar 68,47% dan pada tahun 2013 sebesar 59,42%. Pada tahun 2014 BOPO yang tertinggi dicapai oleh BRI Syariah pada triwulan II sebesar 99,84%. BOPO terendah di tahun 2014 pada Bank Panin Syariah di triwulan IV sebesar 68,27%. Kemudian pada tahun 2013 BOPO tertinggi di capai oleh Bukopin Syariah pada triwulan IV, perkembangan pada Bukopin Syariah dari triwulan I memang meningkat dengan sebesar 88,67%, di triwulan II sebesar 88,82%, dan triwulan IV sebesar 92,29%. Namun untuk nilai BOPO ini yang terendah dapat dikatakan lebih baik dibanding nilai BOPO yang tertinggi. Hal ini disebabkan nilai BOPO yang tinggi mencerminkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional dan berakibat pada berkurangnya laba. Semakin kecil BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang

bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan semakin banyak kredit yang dapat disalurkan.

4.4.3 *Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pada Bank Umum Syariah*

FDR adalah perbandingan antara jumlah pendanaan dengan jumlah deposit yang ada pada bank dimana hasil akhirnya mengukur kemampuan untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh Deposan. Berikut disajikan tabel mengenai perkembangan bagi hasil tingkat mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia per triwulan 2013-2014.

Tabel 4.3
Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Per Triwulan 2013-2014

Nama Bank	Triwulan	Financing to Deposit Ratio (FDR)	
		2013	2014
BNI Syariah	i	80,11	96,67
	ii	92,13	98,96
	iii	96,37	94,29
	iv	97,86	92,58
BRI Syariah	i	100,9	102,13
	ii	103,67	95,14
	iii	105,61	94,85
	iv	102,7	93,9
Mandiri Syariah	i	95,61	90,34
	ii	94,22	89,91
	iii	91,29	85,68
	iv	89,37	82,13
Panin Syariah	i	120,91	112,84
	ii	123,6	140,48
	iii	112,46	111,79
	iv	90,4	94,04
BCA Syariah	i	86,35	89,53
	ii	85,86	85,31
	iii	88,98	93,02
	iv	83,48	91,17
Bukopin Syariah	i	87,8	97,14
	ii	92,43	102,84
	iii	95,15	103,66
	iv	100,29	92,89

Nama Bank	Triwulan	Financing to Deposit Ratio (FDR)	
		2013	2014
Rata-Rata	-	96,56	97,14
Tertinggi	-	123,60	140,48
Terendah	-	80,11	82,13

Sumber: Hasil Pengolahan Data (Laporan Keuangan)

Jika dilihat dari tahun 2013 dan 2014, perkembangan yang terjadi pada nilai FDR ini mengalami fluktuatif. Secara umum dimana untuk rata-rata tahun 2013 sebesar 96,56% dan tahun 2014 sebesar 97,14%. Nilai FDR yang tertinggi pada tahun 2013 sebesar 123,60% dan tahun 2014 sebesar 140,48%. Adapun nilai FDR yang terendah pada tahun 2013 sebesar 80,11% dan tahun 2014 sebesar 82,13%. Pada tahun 2013, Panin Syariah triwulan II menjadi yang tertinggi sebesar 123,6%. Dan BNI Syariah pada triwulan I menjadi yang terendah sebesar 80,11%. Pada tahun 2014 triwulan II nilai FDR yang menjadi tertinggi masih tetap Panin Syariah sebesar 140,48%. Dan Mandiri Syariah triwulan IV menjadi yg terendah sebesar 82,13%.

Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkna kredit. Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke pihak-pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka pendapatan bank akan meningkat. Semakin rendah FDR menunjukkan semakin tinggi likuiditas bank yakni semakin mampu bank dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, tingginya rasio FDR mencerminkan rendahnya likuiditas yang ditandai dengan tingginya pendanaan yang dapat meningkatkan pendapatan namun dapat pula menurunkan kepercayaan.

4.4.4 Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Tingkat bagi hasil adalah suatu sistem untuk menentukan besarnya rata-rata bagian hasil usaha yang menjadi hak antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produknya ada mudharabah dan musyarakah. Mudharabah dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan seperti tabungan, deposito dan pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan. Berikut tabel perkembangan jumlah tingkat bagi hasil tabungan mudharabah.

Tabel 4.16
Perkembangan Jumlah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Per Triwulan 2013-2014

Nama Bank	Triwulan	Bagi Hasil Tingkat Mudharabah		Persentase Peningkatan	
		2013	2014	2013	2014
BNI Syariah	iv 2012	Rp7.902.000.000			
	i	Rp9.057.000.000	Rp2.686.000.000	0,146	-0,729
	ii	Rp9.089.000.000	Rp5.704.000.000	0,003	1,123
	iii	Rp9.493.000.000	Rp8.820.000.000	0,044	0,546
	Iv	Rp9.915.000.000	Rp12.453.000.000	0,044	0,411
BRI Syariah	iv 2012	Rp2.850.000.000			
	i	Rp1.018.000.000	Rp446.000.000	-0,642	0,192
	ii	Rp337.000.000	Rp461.000.000	-0,669	0,336
	iii	Rp353.000.000	Rp611.000.000	0,047	0,325
	iv	Rp374.000.000	Rp453.000.000	0,059	-258
Mandiri Syariah	iv 2012	Rp48.298.748.000			
	i	Rp47.801.021.000	Rp44.409.416.000	-0,01	-0,054
	ii	Rp46.418.441.000	Rp44.796.471.000	-0,029	0,008
	iii	Rp41.216.276.000	Rp43.186.744.000	-0,112	-0,036
	iv	Rp46.971.564.000	Rp42.852.266.000	0,14	-0,008
Panin Syariah	iv 2012	Rp61.000.000			
	i	Rp362.000.000	Rp159.000.000	4,934	-0,22
	ii	Rp314.000.000	Rp120.000.000	-0,132	-0,245

Nama Bank	Triwulan	Bagi Hasil Tingkat Mudharabah		Persentase Peningkatan	
		2013	2014	2013	2014
	iii	Rp308.000.000	Rp445.000.000	-0,02	2,708
	iv	Rp204.000.000	Rp210.000.000	-0,338	-0,528
BCA Syariah	iv 2012	Rp143.000.000			
	i	Rp76.000.000	Rp74.000.000	-0,468	-0,075
	ii	Rp81.000.000	Rp195.000.000	0,066	1,635
	iii	Rp73.000.000	Rp74.000.000	-0,099	-0,62
	iv	Rp80.000.000	Rp65.000.000	0,096	-0,0121
Bukopin Syariah	iv 2012	Rp352.162.000			
	i	Rp332.158.000	Rp676.469.000	-0,057	-0,029
	ii	Rp321.618.000	Rp685.689.000	-0,032	0,014
	iii	Rp659.106.000	Rp753.121.000	1,049	-0,098
	iv	Rp696.410.000	Rp741.153.000	0,05	-0,016
Rata-Rata	-	Rp9.397.941.417	Rp8.794.888.708	0,169	-10,557
Tertinggi	-	Rp47.801.021.000	Rp44.796.471.000		
Terendah	-	Rp73.000.000	Rp65.000.000		

Sumber: Hasil Pengolahan Data (Laporan Keuangan)

Jika dilihat dari tabel diatas, pada tahun 2013, nilai rata-rata bagi hasil tingkat mudharabah pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia adalah sebesar Rp9.397.941.417 dengan bagi hasil tabungan mudharabah tertinggi mencapai angka sebesar 40,22% dimiliki oleh Mandiri Syariah pada triwulan pertama, sedangkan nilai bagi hasil tabungan mudharabah terendah mencapai angka sebesar Rp73.000.000 dimiliki oleh BCA Syariah pada triwulan ketiga. Pada tahun 2014, nilai rata-rata bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia adalah sebesar Rp8.794.888.708 dengan bagi hasil tabungan mudharabah tertinggi mencapai angka sebesar Rp44.796.471.000 dimiliki oleh Mandiri Syariah pada triwulan kedua, sedangkan nilai bagi hasil tabungan mudharabah terendah mencapai angka sebesar

Rp65.000.000 dimiliki oleh BCA Syariah pada triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat.

4.4.5 Pengaruh *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Perolehan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Bank Umum Syariah Secara Parsial

4.4.5.1 Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil analisa perhitungan, diperoleh nilai Koefisien regresi untuk *return on asset* (ROA) adalah sebesar 36,635 dan bertanda positif, artinya apabila *return on asset* (ROA) mengalami peningkatan sebesar 1% dan variabel independen lain tidak mengalami perubahan (konstan), maka bagi hasil tingkat mudharabah akan meningkat sebesar 36,635 miliar rupiah. Dilihat dari diperoleh nilai koefisien determinasi secara parsial *retrun on asset* (ROA) memberikan pengaruh sebesar 27,6%. Dari pengujian hipotesis (uji t) bahwa nilai t_{tabel} sebesar 2,015 dan nilai t_{hitung} sebesar 4,078 dengan nilai signifikan 0,000 berada di daerah penolakan H_0 ($t_{hitung} > t_{tabel}$) sehingga diperoleh keputusan uji parsial adalah menolak H_0 dan menerima H_a . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial *retrun on asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tingkat mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia.

Berdasarkan teori yang ada, dijelaskan bahwa jika ROA naik maka jumlah bagi hasil mudharabah akan naik. Hal ini dikarenakan tingkat pengembalian

investasi yang besar maka menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula. *Return on Asset* (ROA) yang tinggi dapat disebabkan oleh perkembangan laba bersih yang cukup tinggi. Sedangkan *Return On Asset* (ROA) yang rendah dapat disebabkan karena alokasi dana yang terhimpun bank belum sepenuhnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan profit/laba bagi bank, ketidakseimbangan antara penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran dana, karena dana yang terhimpun akan mengendap dan tidak memperoleh laba, dan akhirnya akan berdampak terhadap penurunan *Return On Asset* (ROA) suatu bank, serta jumlah kredit yang bermasalah yang cukup besar juga akan mempengaruhi terhadap *Return On Asset* bank. Hal tersebut dikarenakan perolehan laba suatu Bank Umum Syariah tergantung oleh sumber dana yang diperoleh yang kemudian akan menghasilkan pendapatan dimana pendapatan tersebut akan menjadikan laba bagi Bank Umum Syariah.

4.4.5.2 Pengaruh Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil analisa perhitungan, diperoleh nilai koefisien regresi untuk Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) adalah sebesar sebesar 2,145 dan bertanda positif, artinya apabila Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) mengalami peningkatan sebesar 1% dan variabel independen lain tidak mengalami perubahan (konstan), maka bagi hasil tabungan mudharabah akan meningkat sebesar 2,145 miliar rupiah. Dari hasil pengujian koefisien determinasi secara parsial untuk Biaya Operasional/Pendapatan Operasional

(BOPO) memberikan pengaruh sebesar 0,2%. Dari pengujian hipotesis (uji t) bahwa nilai t_{tabel} sebesar 2,015 dan nilai t_{hitung} sebesar 3,226 dengan nilai signifikan 0,002 berada di daerah penolakan H_0 ($t_{hitung} > t_{tabel}$) sehingga diperoleh keputusan uji parsial adalah menolak H_0 dan menerima H_a . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tingkat mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia.

Berdasarkan teori yang ada, untuk nilai BOPO yang terendah dapat dikatakan lebih baik dibanding nilai BOPO yang tertinggi. Hal ini disebabkan nilai BOPO yang tinggi mencerminkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional dan berakibat pada berkurangnya laba. Semakin kecil BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan semakin banyak kredit yang dapat disalurkan. BOPO ini pada dasarnya berpengaruh terhadap kinerja bank untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna. Agar mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat, dan tuntutan konsumen yang meningkat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi maka pengelolaan bank secara efisien merupakan faktor penting untuk dapat terus bertahan.

4.4.5.3 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Perolehan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil analisa perhitungan, diperoleh nilai koefisien regresi untuk *financing to deposit ratio* (FDR) sebesar -0,417 dan bertanda negatif, artinya jika *financing to deposit ratio* (FDR) mengalami peningkatan sebesar 1% dan variabel independen lain tidak mengalami perubahan (konstan), maka bagi hasil tingkat mudharabah akan menurun sebesar 0,417 miliar rupiah. Dari hasil pengujian koefisien determinasi secara parsial untuk *financing to deposit ratio* (FDR) hanya memberikan pengaruh sebesar 8,8%. Dari pengujian hipotesis (uji t) bahwa nilai t_{tabel} sebesar -2,015 dan nilai t_{hitung} sebesar -2,000 dengan nilai signifikan 0,052 berada di daerah penerimaan $H_0(-t_{hitung} > -t_{tabel})$ sehingga diperoleh keputusan uji parsial adalah menerima H_0 dan menolak H_a . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial *financing to deposit ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil tingkat mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia.

Berdasarkan teori yang ada, dengan ditetapkannya batas maksimum pemberian kredit harus diperhatikan oleh Bank Umum Syariah, maka bank tersebut tidak dapat secara berlebihan melakukan ekspansi pendanaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atau bertujuan untuk secepatnya dapat membesarkan jumlah asetnya, karena hal itu akan membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut dan akan membahayakan dana simpanan para nasabah. Semakin tinggi rasio FDR, maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank tersebut. Oleh karena itu, selain mencerminkan

kondisi likuiditas bank, FDR juga digunakan untuk mengukur tingkat resiko yang menjadi beban bank dalam menjalankan usahanya. Semakin rendah FDR menunjukkan semakin tinggi likuiditas bank yang mampu membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Pengaturan likuiditas bank terutama dimaksudkan agar bank setiap saat dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar.

Berdasarkan hasil analisis, maka diketahui adanya variabel lain selain FDR yang dapat memberikan pengaruh terhadap mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia. Dimana, diperlukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut dan lebih jauh terhadap variabel-variabel lainnya contohnya adalah sumber dana yang dijadikan pendanaan, kredit macet, pendapatan operasional dan administrasi, komisi dan provisi dan lain-lainnya yang secara umum dipandang sebagai sumber pendapatan dari bank dan sumber pengurang pendapatan bank.

4.4.6 Pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Terhadap Perolehan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Bank Umum Syariah Secara Simultan

Berdasarkan hasil analisa perhitungan, diperoleh dari pengujian hipotesis (uji F) bahwa nilai F_{tabel} 2,816 dan nilai F_{hitung} sebesar 8,508 berada didaerah penolakan H_0 ($F_{hitung} > F_{tabel}$) sehingga diperoleh keputusan uji simultan adalah menolak H_0 dan menerima H_a , dapat dilihat dari nilai signifikansi juga bahwa nilai signifikansi ($Sig. = 0,000$) lebih kecil dari 0,05 tarafnya. Maka dapat

disimpulkan bahwa secara simultan *retrun on asset* (ROA), biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) dan *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Dari hasil analisa perhitungan, didapat nilai koefisien determinasi secara simultan *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,367 atau sebesar 36,7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *retrun on asset* (ROA), biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) dan *financing to deposit ratio* (FDR) memberikan kontribusi sebesar 36,7% terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah, sedangkan sebanyak $(1-R^2)$ 63,3% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara simultan *retrun on asset* (ROA), biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) dan *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap bagi hasil tabungan mudharabah berpengaruh pada Bank Umum Syariah. Hal ini diartikan bahwa secara simultan perubahan *retrun on asset* (ROA), biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) dan *financing to deposit ratio* (FDR) akan mempengaruhi tingkat bagi hasil tabungan mudharabah Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi ROA akan meningkatkan bagi hasil tabungan mudharabah dan semakin rendah BOPO akan akan meningkatkan bagi hasil tabungan mudharabah serta semakin tinggi FDR akan meningkatkan bagi hasil tabungan mudharabah.